

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Edwar Manik, 2013, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, hlm.148-153
- Fuady, Munir, 1999, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Citra Adiyta Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1998, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia (1998)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaya, 2004, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadi, M Subhan, 2009, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Hoff, Jerry, 2000, *Undang-undang Kepailitan di Indonesia, (pererjemah Kartini Muladi)*, PT. Tata Nusa, Jakarta.
- Hartini, Rahayu, 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Hadi, M Subhan, 2014, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Hartono, Siti Sumarti, *Seri Hukum Dagang Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, 1993, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- , 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Hernowo, Tri, 2005, *Sekilas Catatan pada Pengadilan Niaga Jakarta*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra, Aditya Bakti, Bandung.
- Purwosutjipto, H.M.N, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8 : Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, PT. Djambatan, Jakarta.

- Sinaga, M. Syamsudin, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta.
- Soemardjono, S.W. Maria, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sofyan, Sri Soedewi Maschun, 1980, *Hukum Perdata Hukum Perutangan Bagian 4*, Seksi Hukum Perdat UGM, Yogyakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remy, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Tumbuan, Fred, dalam Rudy A.Lontoh, et al, 2001, *Pokok-pokok Undang-undang Kepailitan Sebagaimana Diubah oleh PERPU No. 1/1998 Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Suyatno, R. Anton, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Surakhmad, Winarno, 1983, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung.
- Usman, Rahmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Herziene Indonesis Reglement (HIR) (Stbl 1984 : No. 16 Jo Stbl 1941 No.44)

Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (BRg) (Stbl 1927 No. 227)

Putusan Perkara Nomor : 29/Pdt.Sus/ PKPU/2014/PN. Niaga. Jkt. Pst tanggal 16 Juni 2014

Putusan Perkara Nomor : 16/Pdt.Sus/PKPU/2015/ PN. Niaga. Jkt. Pst tanggal 06 Maret 2015